

PERAN BKKBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Dominggus Maghu¹, Rahman Wanto Yuwono², Nursabria³, Ismiatun⁴, Rahmat Hidayat⁵, Muhammad Aprian Jailani⁶, Sulhan Hadi⁷

minggusmaghu23@gmail.com¹, rahmanwanto930@gmail.com², nursabriabima@gmail.com³, ismiatundahlan@gmail.com⁴, rahmat_dayat22@yahoo.com⁵, aprian.jaelani@ummat.ac.id⁶, sulhanhadi1212@gmail.com⁷

Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat, serta menelaah strategi dan langkah yang diambil berdasarkan kerangka kebijakan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator pelaksana program, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2). Dalam perannya tersebut, BKKBN bertanggung jawab mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi program secara konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di berbagai tingkatan. Sebagai pelaksana utama, BKKBN telah merumuskan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, yang didasarkan pada tiga pendekatan utama: intervensi gizi, kolaborasi lintas sektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta mengandalkan data dari studi literatur yang relevan guna menelaah efektivitas peran BKKBN di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKKBN Kabupaten Lombok Barat memiliki peran penting dalam menurunkan angka stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan implementasi strategi berbasis keluarga. Temuan ini menegaskan urgensi kebijakan yang terstruktur serta dukungan kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan program penurunan stunting di tingkat lokal.

Kata Kunci: BKKBN, Percepatan Penurunan Stunting.

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) in efforts to accelerate stunting reduction in West Lombok Regency, as well as to examine the strategies and steps taken based on the national policy framework. Based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, BKKBN is appointed as the program implementation coordinator, as stated in Article 15 paragraph (2). In this role, BKKBN is responsible for coordinating, synergizing, and evaluating programs in a convergent and integrated manner by involving cross-sectors at various levels. As the main implementer, BKKBN has formulated a National Action Plan for Accelerating the Reduction of Stunting Rates in Indonesia, which is based on three main approaches: nutritional interventions, cross-sector and multi-party collaboration, and a family-based approach at risk of stunting. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, and relies on data from relevant literature studies to examine the effectiveness of BKKBN's role at the regional level. The results of the study indicate that BKKBN West Lombok Regency has an important role in reducing stunting rates by strengthening cross-sector coordination and implementing family-based strategies. This finding emphasizes the urgency of structured policies and institutional support in supporting the sustainability of stunting reduction programs at the local level.

Keywords: BKKBN, Acceleration Of Stunting Reduction.

PENDAHULUAN

Stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia

di Indonesia. Masalah ini merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, khususnya dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang ditandai dengan tinggi atau panjang badan di bawah standar usia (Masyarakat et al., 2024). Dampak jangka panjang dari stunting tidak hanya terlihat pada pertumbuhan fisik, namun juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan, produktivitas di masa dewasa, dan meningkatkan risiko terkena penyakit degeneratif (Candarmaweni & Rahayu, 2020) Sebagai bentuk komitmen nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini menetapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator pelaksanaan program, dengan mandat untuk menyinergikan berbagai sektor, mengintegrasikan kebijakan, serta mengevaluasi pelaksanaan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah (Perpres No. 72 Tahun 2021, Pasal 15 Ayat 2).

Kabupaten Lombok Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena prevalensi stunting di wilayah ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 14% pada tahun 2024 (Pratiwi et al., 2024) Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil capaian belum optimal. Ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara strategi nasional dan realisasi program di tingkat lokal, terutama dalam aspek koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya pelaksana, dan penerimaan masyarakat terhadap program.

Penelitian terdahulu oleh (Mastina & Mitra, 2023) menegaskan bahwa efektivitas program percepatan penurunan stunting sangat bergantung pada sinergi kelembagaan, kualitas pelaksana, serta partisipasi aktif masyarakat. Di sisi lain, (Nugroho et al., 2023) juga mengungkapkan bahwa rendahnya literasi gizi dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi hambatan besar dalam implementasi program di daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat serta menilai kesesuaian implementasi kebijakan di tingkat lokal dengan strategi nasional. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan kebijakan dan program penanggulangan stunting yang lebih efektif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai strategi dan langkah-langkah yang diambil BKKBN berdasarkan kebijakan nasional, terutama Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting, serta laporan dan publikasi terkait pelaksanaan program BKKBN di tingkat daerah. Teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan mengenai peran serta efektivitas program percepatan penurunan stunting.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan, menguraikan, dan menginterpretasikan informasi dari sumber pustaka. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan kontribusi BKKBN dalam koordinasi lintas sektor dan penerapan strategi berbasis keluarga berisiko stunting di Kabupaten Lombok Barat.

Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran strategis BKKBN serta memberikan rekomendasi dalam memperkuat pelaksanaan program percepatan penurunan stunting sesuai dengan kebijakan nasional di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memainkan peran penting dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan kajian literatur dan dokumen terkait, peran BKKBN dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama, yakni:

a) Koordinasi Antar Sektor

BKKBN berperan sebagai penghubung utama yang mengintegrasikan program-program dari berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat, (STUNTING & Kusroh, 2023). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, sinergi lintas sektor merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting (Perpres No. 72 Tahun 2021, Pasal 15 Ayat 2). Di tingkat Kabupaten Lombok Barat, BKKBN secara proaktif memediasi kolaborasi antar dinas kesehatan, sosial, pendidikan, dan organisasi masyarakat agar pelaksanaan program berjalan terkoordinasi dan efektif.

b) Pelaksanaan Intervensi Gizi

BKKBN melaksanakan intervensi gizi yang mencakup pemberian suplementasi, edukasi tentang pola makan sehat, serta pemantauan gizi ibu dan anak. Intervensi ini melibatkan kader kesehatan dan keluarga rentan di desa-desa, sesuai dengan anjuran (Rika Widianita, 2023) mengenai pentingnya intervensi gizi untuk mencegah stunting.

c) Pendekatan Keluarga Berisiko Stunting

Program difokuskan pada keluarga yang berisiko tinggi melalui identifikasi dan pendampingan intensif. BKKBN berkolaborasi dengan aparat desa dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi dan dukungan praktis untuk mendorong pola hidup sehat dan asupan gizi yang memadai di tingkat keluarga. (Mastina & Mitra, 2023)

d) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Program

BKKBN rutin mengadakan pelatihan bagi pelaksana program dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Monitoring yang kontinu membantu mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi yang tepat, sehingga program dapat terus diperbaiki. (Tematik, 2021)

Meskipun terdapat kemajuan, penelitian ini juga mencatat adanya kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Oleh karena itu, BKKBN dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengembangkan inovasi dan strategi yang lebih adaptif untuk mengatasi tantangan tersebut sesuai konteks lokal.

Penurunan angka stunting menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penelitian ini menegaskan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran sentral dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat melalui koordinasi lintas sektor, pelaksanaan intervensi gizi, serta pendekatan yang fokus pada keluarga berisiko. (Viona Erlanda & Dida Rahmadanik, 2023)

Koordinasi Lintas Sektor sebagai Faktor Kunci Keberhasilan

Sebagai koordinator pelaksana di tingkat daerah, BKKBN memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan berbagai program dan kebijakan lintas sektor terkait penurunan stunting. (Mastina & Mitra, 2023) menyatakan bahwa keberhasilan program penurunan

stunting sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan pemberdayaan sosial. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan konvergen (Perpres No. 72 Tahun 2021, Pasal 15 Ayat 2). Di Kabupaten Lombok Barat, BKKBN berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta sehingga program yang dijalankan dapat saling mendukung dan memperkuat hasil yang dicapai.

Pelaksanaan Intervensi Gizi secara Komprehensif

Intervensi gizi merupakan bagian penting dari upaya BKKBN dalam menanggulangi stunting secara langsung. Program ini mencakup pemberian suplementasi mikronutrien, edukasi tentang pola makan sehat, serta pemantauan pertumbuhan anak dan ibu hamil. Menurut (Rika Widianita, 2023) intervensi gizi yang spesifik dan sensitif sangat vital dalam pencegahan stunting, khususnya bila diterapkan pada 1.000 hari pertama kehidupan. Di Kabupaten Lombok Barat, peran kader kesehatan desa dalam mendampingi keluarga berisiko memperkuat pelaksanaan intervensi tersebut.

Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko

Fokus BKKBN pada keluarga dengan risiko tinggi mengalami stunting menunjukkan strategi preventif yang tepat sasaran. Penelitian oleh (Rika Widianita, 2023) menegaskan bahwa penanganan stunting harus mempertimbangkan konteks keluarga dan kondisi sosial ekonomi, sebab faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi status gizi anak. Pendekatan ini dilakukan melalui identifikasi keluarga rentan dan pemberian pendampingan langsung oleh tenaga kesehatan dan aparat desa, sehingga meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam mengelola asupan gizi dan pola hidup sehat.

Penguatan Kapasitas dan Evaluasi Berkelanjutan

Evaluasi dan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin oleh BKKBN memainkan peran penting dalam menjamin efektivitas program percepatan penurunan stunting. Melalui pemantauan yang dilakukan secara berkala, pemangku kepentingan dapat mendeteksi hambatan yang muncul di lapangan dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan berbasis bukti serta pengembangan kompetensi pelaksana program di tingkat lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh (Suryanto & Kesehatan, 2024) keberhasilan pelaksanaan program stunting sangat bergantung pada keberadaan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten serta ditindaklanjuti dengan respons yang tepat.

Tantangan dalam Pelaksanaan Program

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, penelitian ini mengungkapkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi memadai serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi dan pola hidup sehat. (Picauly, 2021) menegaskan bahwa faktor sosial, budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi hambatan utama dalam efektivitas program penurunan stunting. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat serta memperluas edukasi kepada masyarakat, guna memastikan bahwa intervensi yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran krusial dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lombok Barat. Peran ini terealisasi melalui upaya koordinasi antar sektor, pelaksanaan edukasi dan

pendampingan kepada keluarga, serta pemanfaatan data keluarga berisiko yang terintegrasi dalam sistem New Siga. Pendekatan yang menggabungkan berbagai aspek tersebut serta didukung oleh data yang valid terbukti meningkatkan efektivitas program dan mempengaruhi perubahan perilaku keluarga dalam mencegah stunting. Temuan ini memperkuat pentingnya kolaborasi antar institusi dan penerapan teknologi informasi sebagai faktor utama keberhasilan program. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem data yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kelangsungan dan peningkatan efektivitas program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Candarmaweni, & Rahayu, A. Y. S. (2020). Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang (the Challenges of Preventing Stunting in Indonesia in the New Normal Era Through Community Engagement). *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 9(3), 136–146. <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57781>
- Mastina, T., & Mitra. (2023). Peran Koordinasi Lintas Sektor Dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(1), 131–144. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>
- Masyarakat, J. P., Tenggara, N., & Proyek, B. (2024). Jurnal pengabdian masyarakat. 1(2), 68–79. <https://doi.org/10.71024/bhakti.2024.v1i2.49>
- Nugroho, M. R., Armeidi, E., & Mahyuddin, M. (2023). Analysis of Indonesia’s Nutritional Status Survey Results 2021–2022: Trend of Stunting Prevalence Rates in the Provinces of South Sumatera and Bengkulu Towards a National Target of 14% in 2024. *Indonesian Journal of Health Research and Development*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.58723/ijhrd.v1i1.26>
- Picauly, I. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Terhadap Cakupan Program Intervensi Gizi Sensitif Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pangan Gizi Dan Kesehatan*, 10(2), 71–85. <https://doi.org/10.51556/ejpazih.v10i2.156>
- Pratiwi, R., Untari, J., & Samosir, H. R. (2024). Peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 9(3), 196–209.
- Rika Widianita, D. (2023). INTERVENSI BERBASIS KELUARGA PADA ANAK DENGAN STUNTING. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- STUNTING, P. B. K. D. K. B. N. D. P. P., & Kusroh. (2023). PERAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. 4.
- Suryanto, G. I., & Kesehatan, D. (2024). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 Dampak Stunting. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan ..., November, 1–32. https://tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis_2018/Sesi_1_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf
- Tematik, I. D. A. N. (2021). stunting 2021 Upaya penurunan mengacu. 48–52.
- Viona Erlanda, & Dida Rahmadanik. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(2), 90–97. <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i2.160>